

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.* (2014). Jakarta: Diperbanyak oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.* (2020). Jakarta: Diperbanyak oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Hakim, M. A., Gufron, R., & Anuary, R. (2015). Pengertian Tunjangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Hardani., Helmina,A., Jumari., Evi., Rousahandy., N. (2020).Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id*, ISBN 9786237066330.
- Kaengke, A. (2021). *Analisis Sistem Penggajian Pada Perusahaan Pt. Multi Prima Agung.* *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Volume 9(2), hlm. 607–614.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.* (2018). Jakarta: Diperbanyak oleh Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.* (2022). Jakarta: Diperbanyak oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.* (2021). Jakarta: Diperbanyak oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Nengsih, F. (2017). *Efektivitas pencairan dana, pembayaran gaji pegawai.* Studi Magister Ilmu Administrasi di Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 14(3), hlm. 241–247.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.* (1992). Jakarta: Diperbanyak oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.* (2007). Jakarta: Diperbanyak oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.* (2019). Jakarta: Diperbanyak oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Rahmawati, T. A. (2020). *Tinjauan Atas Prosedur Pencatatan Piutang Usaha Pada Pt Trengginas Jaya.* hlm. 9–25.
- Codemi Global. (2022). *Pengaruh Gaji dan Tunjangan pada Kinerja Pegawai.* diakses pada 3 Mei 2023, Dari <https://codemi.co.id/gaji-dan-tunjangan/>.
- PMK Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.* (2022). Jakarta: Diperbanyak oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Risda, 2023

**TINJAUAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG GAJI PEGAWAI PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.* (2022). Jakarta: Diperbanyak oleh Sarjana.
- Siska Yulia Weny. (2023). *Penerapan Pengendalian Intern Untuk Meningkatkan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penggajian Pada PT. Sispum Sarana Graha. Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, Volume 3(1), hlm. 149–163.
- Substansi Bagian Umum Keuangan. (2022). *Mekanisme Pembayaran Belanja Negara.* <https://www.youtube.com/watch?v=8bR7rX5qFUA&t=108s>, diakses pada 8 Mei pukul 01.10.
- Tarigan, V., Sriwiyanti, E., & Tumanggor, B. (2022). *Penerapan SPAN Pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar*, Volume 6(2), hlm. 1716–1721.
- Zahrah Widyaiswari Prasetyaningrum. (2021). *Pencairan Dana Langsung Gaji Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Journal Information*, Volume 10(3), hlm. 1–16.